

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Sebuah intitusi pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal, non formal dan informal atau lembaga sekolah/madrasah, keluarga dan lingkungan sosial, harus bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak bangsa demi terciptanya anak bangsa yang berpendidikan, tetapi jangan sampai sebuah lembaga pendidikan hanya mementingkan perkembangan intelektual peserta didik, lembaga pendidikan juga harus mementingkan sebuah pembentukan akhlak yang mulia dan akal yang berbudi pekerti.<sup>1</sup> Pendidikan pada dasarnya sebuah proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengembangkan intelektual dan membentuk karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional

Tujuan pendidikan nasional adalah terciptanya sistem pendidikan yang memberi kesempatan kepada seluruh putra putri bangsa yang ingin menjadi putra putri indonesia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang setiap tahunnya selalu berubah. Seiring dengan perkembangan zaman maka putra putri bangsa mengharapkan pendidikan nasional bisa menyelaraskan diri dengan perkembangan zaman yang bisa mencetak putra putri bangsa yang bekemajuan, sejahtera kehidupannya,

---

<sup>1</sup> Abdul Majid, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013) 2.

bahagia lahir dan batin, berkeadilan, saling menghormati dan menghargai, menegakkan hukum dengan adil, saling menghargai hak asasi manusia, toleransi, dan modern, kemudian bisa hidup damai, nyaman, tentram, dengan meninggalkan tatanan kehidupan negaitf.<sup>2</sup>

Pendidikan formal di Indonesia ada dua istilah yakni sekolah dan madrasah, sekolah diidentik dengan sebuah lembaga formal yang umum sedangkan Madrasah diidentik dengan sebuah lembaga formal yang lebih khusus mempelajari agama, tetapi bukan semua agama yang ada di Indonesia melainkan khusus agama Islam yang merupakan agama yang paling bannyak penganutnya di bumi pertiwi ini. Madrasah merupakan sebuah lembaga pendidikan islam yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Kehadiran madrasah pada awal abad 20 dapat dikatakan sebagai perkembangan baru di mana madrasah mulai mengkolaborasikan antara pendidikan islam dengan pendidikan umum. Hal ini dimungkinkan karena gerakan pembaharuan mulai muncul dengan semangat progresif seperti halnya di negara-negara Timur tengah dibawah pengaruh al-Afghani. Dengan demikian dalam sejarahnya madrasah-madrasah yang ada di Indonesia tidak sepenuhnya mencontoh sekolah-sekolah yang diterapkan Belanda di Indonesia, tetapi semua ini sangat mungkin merupakan proses logis dari sebuah gerakan pembaharuan yang dilancarkan umat islam itu sendiri.<sup>3</sup>

Disetiap lembaga formal ada yang menahkodainya yaitu kepala madrasah. Maka dari itu kepala madrasah yang menduduki kedudukan paling

---

<sup>2</sup> Siswanto, "Reorientasi Pendidikan Islam", Tadris, Vol. 5 (2010), 3.

<sup>3</sup> Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1999), 88.

tinggi di madrasah mempunyai hak untuk membuat kebijakan-kebijakan tertentu demi kemajuan madrasah yang dinahkodainya dan membuat madrasah yang dinahkodainya dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat pendidikan yang menghasilkan peserta didik yg bisa menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kepala madrasah memiliki tugas penting untuk memberikan layanan pendidikan kepada seluruh peserta didiknya dan menciptakan madrasah yang dinahkodainya sebagai madrasah yang demokratis. Sebagai pemimpin dilembaga pendidikan kepala madrasah harus melakukan monitoring pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Di setiap monitoringnya kepala madrasah harus bisa memahami kondisi dan pengaruh, baik yang berasal dari internal maupun dari eksternal madrasah yang di nahkodainya.

Sebagai pemimpin di madrasah, kepala madrasah harus bisa menjadi teladan yang baik dalam lingkungan pendidikan yaitu menjadi kepala madrasah yang demokrat. Menjadi kepala madrasah yang demokratis yaitu dalam membuat sebuah kebijakan dalam pendidikan selalu menonjolkan semangat transparansi, bermusyawarah dengan para guru, tidak otoriter, dan bisa mempertanggungjawabkan segala kebijakannya baik kepada Allah SWT, masyarakat, dan kepada dirinya.<sup>4</sup> Dengan pola kebijakan seperti itulah akan menciptakan sebuah kebijakan yang secara tidak langsung memberikan contoh bagaimana menciptakan interaksi yang positif dalam lembaga

---

<sup>4</sup> Ainunrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren* (Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005), 76.

pendidikan yang dinahkodainya. Hal ini bisa menciptakan rasa nyaman terhadap aktivitas pendidikan di lembaga tersebut.

Kepala madrasah dalam menjalankan tugasnya mempunyai peran sebagai pelaksana untuk mengsucceskan tujuan pendidikan nasional, visi, dan misi madrasah yang sudah termuat dalam program madrasah yang direncanakan sebelumnya. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dijelaskan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam sub urusan Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Pendidik, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sastra.<sup>5</sup> Dengan adanya undang-undang mengenai otonomi daerah maka kepala sekolah mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan sendiri sesuai dengan visi dan misi madrasah, dan sinkron dengan tujuan pendidikan nasional.

Kepala Madrasah sebagai penentu kebijakan teratas dalam sebuah lembaga pendidikan formal harus mengedepankan sebuah keterbukaan dalam menjalankan dan membuat sebuah kebijakan dilembaga yang dinahkoadinya. Seiring dengan program otonomi daerah, dimana kepala madrasah bukan lagi menjadi perpanjangan tangan dari birokrasi pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu kepala madrasah mempunyai wewenang dalam kepemimpinan otonom dan harus

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

dimaksimalkan dalam kepemimpinannya dalam bentuk kepemimpinan yang demokratis.<sup>6</sup>

Seiring dengan kehadiran reformasi, kran kebebasan dibuka seluas-luasnya. Negara memberikan ruang bagi tumbuh kembangnya pemikiran dan gerakan, termasuk gerakan yang dapat mengancam kebebasan itu sendiri. Momentum kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh kelompok keagamaan yang eksklusif untuk menyebarkan ajarannya di Indonesia. Satu kenyataan di Indonesia adalah tumbuh dan suburnya pemahaman radikal terhadap ajaran Islam. Nilai-nilai universalitas Islam seakan tercerabut dari akarnya ketika kelompok ini tampil ke permukaan. Bahkan, usaha penafsiran dan ide-ide segar yang progresif dan konstruktif dianggap oleh kelompok ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam<sup>7</sup>. Dinamisasi dalam bidang pemikiran dianggap sebagai ancaman yang berpotensi merusak kemurnian agama.

Akar islam radikal sudah ada sejak zaman sahabat. Persoalan tersebut bermula dari konflik politik yang terjadi karena terbunuhnya Khalifah Ustman bin Affan dan dilantiknya Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah ke empat.<sup>8</sup> Dalam masa kekuasaannya mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak. Hingga pada akhirnya, Ali bin abi Thalib menawarkan perdamaian melalui arbitrase yang kemudian memunculkan kaum Khawarij, yaitu yang dikenal sebagai golongan radikal baik dari pandangan politik atau pun theologi. Kaum Khawarij dikenal dengan fahamnya yang radikal, dan tidak mengenal

---

<sup>6</sup> Ainurrafiq Dawam, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*,... 76.

<sup>7</sup> Al - Zatro Ng. *Gerakan Islam Simbolik Politik Kepentingan FPI* (Yogyakarta: LKIS, 2006),79

<sup>8</sup> Nurjannah, "Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah, Jurnal Dakwah", Vol. 14 (2013), 180.

kompromi. Hal ini dibuktikan dengan tindakan kekerasan dalam mencapai tujuannya, yaitu melakukan teror, pembunuhan, dan perbuatan yang kejam.<sup>9</sup>

Benih paham Islam radikal tersebut berkembang pesat hingga saat ini. Di Indonesia, arus radikalisme muncul kembali yang diwakili para eks Darul Islam (DI)/Negara Islam Indonesia dalam “Pertemuan Mohani” pada 1974. Pertemuan Mohani tersebut bertujuan untuk menjalin komitmen dalam mewujudkan negara Islam.<sup>10</sup> Sejak saat itu, gerakan Islam garis keras mulai bermunculan. Gerakan Front Pembela Islam, Forum Komunikasi Ahlul Sunnah wal Jama'ah, Laskar Jihad, Jundullah, Majelis Ta'lim al-Ishlah, dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), serta gerakan Islam garis keras lainnya.

Paham Islam radikal dengan karakteristiknya yang keras ini mudah merasuki generasi muda khususnya siswa SMA/MA dan mahasiswa baru yang belum memiliki pondasi karakter yang kuat sehingga mudah dipengaruhi untuk mempunyai pemahaman Islam radikal. Maka dari itu pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini dengan harapan siswa mampu menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh kekerasan. Pendidikan karakter mulai diterapkan di sekolah-sekolah tetapi banyak mengalami kegagalan karena pendidikan karakter yang diterapkan selama ini minus keimanan dan konsep adab. Kepala madrasah sebagai pemimpin mempunyai wewenang untuk membuat sebuah kebijakan dalam menanamkan karakter dengan internalisasi nilai-nilai adab kedalam pribadi peserta didiknya.

---

<sup>9</sup> Anzar Abdullah, “Gerakan Radikalisme dalam Islam: Perspektif Historis,” ADDIN, Vol. 10 (2016), 56.

<sup>10</sup> Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta*, (Jakarta: SETARA Institute, 2012), 11.

Sebagaimana yang terjadi di negara ini bahwa paham-paham islam radikal mulai meresahkan masyarakat indonesia. Paham islam radikal mulai mengancam kedamaian kehidupan di indonesia, menghilangkan kehidupan bertoleransi di indonesia yang sudah tercipta semenjak masa kemerdekaan dinegara ini. Sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya memberantas paham-paham islam radikal yang mengancam keutuhan negara ini. Setelah presiden jokowi dilantik beliau memilih beberapa menteri yang punya kemampuan dalam memberantas paham-paham islam radikal. Diantaranya Mahfud MD yang dijadikan menteri Polhukam. Dan yang paling mengejutkan dan jadi perbincangan masyarakat indonesia yakni Fahrul Razi yang dijadikan menteri Agama yang berlatar belakang Militer.

Rupanya presiden Jokowi ingin memberantas paham-paham radikal melalui kementerian Agama dengan memilih seorang menteri yang berlatar belakang Militer. Dan benar saja bahwasanya presiden memberikan pesan khusus kepada menteri agama yang baru dilantik supaya memberantas paham-paham islam radikal. Dengan arahan presiden memberantas paham islam radikal lewat kementerian agama, maka lembaga formal yang ada dibawah naungan Kemenag juga punya andil untuk mencegah peserta didiknya manganut paham-paham islam radikal yaitu dengan sebuah kebijakan kepala madrasah.

Dengan apa yang telah dipaparkan diatas penulis menemukan sebuah hal yang menarik dalam suatu lembaga Madrasah Aliyah yang telah melakukan pencegahan terhadap peserta didiknya supaya tidak terpengaruh

dengan paham-paham islam radikal dan diharapkan para peserta didik ketika nanti sudah menjadi alumni nantiya dan hidup denga msyarakat umum atau berkolaborasi dengan masyarakat umum mereka sudah mengetahui bahaya-bahaya ketika terpapar paham islam radikal dan ciri-ciri orang yang terpapar paham islam radikal sehingga mereka nanti ketika sudah jadi alumni bisa terhindar dari pergaulan dengan orang yang terpapar paham islam radikal.

Dari pengamatan penulis dalam kegiatan belajar mengajar di MA Miftahul Qulub ada hal yang menarik dan berbeda dengan umumnya. Kepala Madrasah dalam mengemban amanah sebagai nahkoda di MA Miftahul Qulub tidak diam saja atau hanya mengikuti aturan yang ada baik aturan yang sudah ada dari kementrian Agama ataupun aturan dari yayasan. Kepala Madrasah berinovasi dengan membuat beberapa kebijakan-kebijakan yang mana proses belajar mengajar di MA Miftahul Qulub berbeda dengan Madrasah Aliyah pada umumnya. Madrasah pada umumnya dikenal sebagai sekolah agama islam yang memberikan mata pelajaran agama lebih banyak dari pada sekolah umum yakni al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, dan SKI. Lembaga MA Miftahul Qulub tidak hanya memberikan mata pelajaran agama seperti madrasah pada umunya tetapi. MA Miftahul Qulub tetap mengikuti kurikulum nasional tetapi juga memadukan dengan mulok yang dikembangkan sendiri yakni dengan menambahkan mata pelajaran agama yaitu Aswaja dan Ta'lim Muta'allim. Selain itu kepala madrasah juga membuat program menanamkan nilai-nilai karakter toleransi dan menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter toleransi melalui kultum sebagai pencegahan paham



islam radikal. Kepala madrasah juga menanamkan sejak dini kepada para peserta didiknya untuk tebiasa mengikuti dan berkhitmah di organisasi IPNU IPPNU.<sup>11</sup> Melalui kebijakan kepala madrasah inilah lembaga Madrasah Aliyah Miftahul Qulub polagan melakukan upaya pencegahan terhadap paham islam radikal yang sudah meresahkan masyarakat indonesia. Dengan melakukan pencegahan ini maka akan memberikan pemahaman terhadap peserta didiknya terhadap bahaya paham islam radikal dan juga ingin menjaga nama baik lembaga itu sendiri. Karena kalau misalkan ada salah satu peserta didik atau alumni dari lembaga MAMiftahul Qulub yang terpapar paham islam radikal itu bisa mencoreng nama baik sekolah. Masyarakat akan beranggapan bahwa lembaga MA Miftahul Qulub tidak bisa mendidik siswanya bagaimana caranya menjalankan kehidupannya dengan agama islam yang rahmatal lil`alamin tidak membuat masyarakat resah. Maka dengan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dilembaga Madrasah Aliyah Miftahul Qulub polagan dengan mengangkat judul “Kebijakan Kepala Madrasah dalam Mencegah Paham Islam Radikal di MA Mifathul Qulub Polagan Galis Pamekasan”.

## **B. Fokus Penelitian:**

Berawal dari konteks penelitian dari judul diatas, maka akan difokuskan pada:

1. Apa kebijakan kepala madrasah dalam mencegah paham Islam radikal di MA Miftahul Qulub Polagan Galis Pamekasan ?

---

<sup>11</sup> Observasi dilakukan di MA Miftahul Qulub Pada Hari Ahad tanggal 17 November 2019, pukul 07.30 - 09.30.

2. Bagaimana implementasi kebijakan kepala madrasah dalam mencegah paham Islam radikal di MA Miftahul Qulub Polagan Galis Pamekasan ?
3. Bagaimana hasil kebijakan kepala madrasah dalam mencegah paham Islam radikal di MA Miftahul Qulub Polagan Galis Pamekasan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan kepala madrasah dalam mencegah paham Islam radikal di MA Miftahul Qulub Polagan Galis Pamekasan.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan kepala madrasah dalam mencegah paham Islam radikal di MA Miftahul Qulub Polagan Galis Pamekasan.
3. Untuk mengetahui hasil kebijakan kepala madrasah dalam mencegah paham Islam radikal di MA Miftahul Qulub Polagan Galis Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap aktivitas yang dilakukan manusia pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dan di tataran itu terdapat manfaat atau nilai guna yang bersifat positif, baik bagi orang yang melakukan aktivitas tersebut maupun bagi orang di luar dirinya. Apabila peneliti telah selesai mengadakan penelitian dan memperoleh hasil, ia diharapkan dapat menyumbangkan hasil karyanya tersebut untuk negara, masyarakat atau khususnya kepada bidang

yang sedang diteliti. Begitu pula dengan penelitian ini, penulis maksudkan untuk mempunyai nilai guna atau kemanfaatan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat untuk mempertajam daya kritis dan nalar terhadap masalah-masalah yang berkenaan dengan pendidikan
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada kajian-kajian ke Islaman terutama yang berkaitan dengan Islam radikal.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi IAIN Madura, penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan juga menjadi tambahan referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.
  - b. Bagi MA Miftahul Qulub, Sebagai masukan bagi para pengelola dalam memelihara dan meningkatkan pendidikan di MA. Miftahul Qulub dan Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu terutama dalam wawasan pendidikan madrasah dalam mencegah paham islam radikal.
  - c. Bagi penelitian berikutnya, menjadi bahan bacaan yang dapat digunakan sebagai alat untuk menambah pengetahuan, informasi dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya tentang kebijakn kepala madrsah dalam mencegah paham islam radikal.

## **E. Definisi Istilah**

Judul tesis ini tersusun dari beberapa istilah atau partikel-partikel kata yang pengertian-pengertiannya perlu didefinisi untuk menjadi pedoman dan menghindari kerancuan dalam pembahasan lebih lanjut. Ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan untuk keperluan operasional dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Kebijakan**

Kebijakan merupakan perencanaan atau sebuah konsep dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak seperti halnya dalam pemerintahan, organisasi.

### **2. Kepala Madrasah**

Kata kepala ini bisa didefinisikan pemimpin atau ketua dalam suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan madrasah berasal dari bahasa arab dari kata darasa yang mempunyai makna belajar, madrasah merupakan tempat belajar sama halnya dengan sekolah pada umumnya yang membedakan adalah kurikulumnya yang lebih kental dengan pelajaran-pelajaran agama Islam.

### **3. Kebijakan Kepala Madrasah**

Kebijakan Kepala Madrasah yaitu kepala madrasah membuat keputusan-keputusan dan program-program untuk menciptakan aktivitas-aktivitas belajar sesuai dengan Visi dan Misi madrasah dan sinkron dengan tujuan pendidikan nasional.

#### 4. Islam Radikal

Islam radikal adalah suatu gerakan yang memiliki ciri radikal dengan indikator adanya karakter keras dan tegas, cenderung tanpa kompromi dalam mencapai agenda-agenda tertentu yang berkaitan dengan kelompok muslim tertentu, bahkan dengan pandangan dunia Islam tertentu sebagai sebuah agama.

Dari definisi yang telah dipaparkan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan dalam hal ini merupakan sebuah perubahan/tambahan aturan yang dibuat oleh kepala madrasah sebagai nahkoda disuatu lembaga pendidikan formal untuk mencegah paham Islam radikal terhadap peserta didiknya dikarenakan paham islam radikal ini berbahaya untuk kehidupan bermasyarakat dan untuk pribadi siswa itu sendiri bahwasanya islam radikal mencuci pikiran seseorang untuk memiliki sikap yang keras atau arogansi dan intoleran.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Nala Auna Rabba “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Mencegah Radikalisme Di Sma Khadijah Surabaya”.<sup>12</sup> Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Mencegah Radikalisme di SMA Khadijah Surabaya. Surabaya. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing Moh. Faizin, M.Pd.I, Drs. Sutikno, M.Pd.I.

---

<sup>12</sup> Nala Auna rabba “Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Mencegah Radikalisme di SMA Khadijah Surabaya”. (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya) 2019

Penelitian ini bermula dari terjadinya aksi-aksi kekerasan yang bersumber dari pemahaman radikal. Kecenderungan yang menjadi sasaran dalam penyebaran paham ini adalah anak-anak dalam usia remaja yang menduduki sekolah tingkat menengah. Guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran untuk memberikan pemahaman mengenai akidah yang benar dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai kebhinekaan dan kebangsaan sebagai bekal untuk dapat mencegah timbulnya gesek-gesekan antar umat Islam maupun umat beragama serta menghindari ajaran radikal untuk mencegah aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Fokus dalam penelitian ini adalah peran guru Pendidikan Agama Islam dalam mencegah penyebaran paham radikal di lingkungan sekolah, dan juga kontrol guru Pendidikan Agama Islam terhadap perkembangan dan perilaku siswa. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru Pendidikan Agama Islam, dan Siswa SMA Khadijah Surabaya. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan dan dari makna tersebut dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis kajian skripsi ini, peran guru Pendidikan Agama Islam dalam mencegah penyebaran paham radikal di lingkungan sekolah yakni dengan mengembangkan kurikulum, memperkuat pendidikan karakter, menambah mata pelajaran Ahlusunnah wal-Jama'ah, melakukan pendampingan dalam kegiatan nonakademik. Dalam kontrol terhadap perkembangan dan

perilaku siswa, guru melakukan dengan kontrol bahan ajar, buku di perpustakaan, situs-situs yang dikunjungi siswa.

2. Hasniati, "Analisis Muatan Radikalisme dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA"<sup>13</sup>. Latar belakang penelitian ini adalah pemberitaan di media massa dan riset-riset yang menyebutkan bahwa buku teks PAI SMA mengandung muatan radikalisme, intoleransi dan kekerasan. Penelitian memiliki dua tujuan. Pertama: untuk mengetahui teks-teks yang bermuatan radikal, toleransi dan demokrasi. Kedua: untuk melakukan perbandingan proporsi antara teks yang bermuatan radikal dengan teks yang bermuatan toleransi dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dan analisis wacana. Obyek penelitian ialah buku teks PAI SMA terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Erlangga, dan Yudistira. Penelitian ini menemukan bahwa ketiga buku teks mengandung pesan yang berlawanan. Pada satu sisi, buku teks mengandung stigma negatif terhadap kelompok agama yang berbeda, membid'ahkan pandangan yang berbeda dan mengklaim diri paling benar, mengusung khilafah Islamiyah, menolak demokrasi, dan memiliki stigma negatif terhadap Barat. Pada sisi lain, ketiga buku teks menekankan kedamaian, mengutamakan persatuan, mengedepankan sikap saling menghargai dan saling menghormati, mengutamakan musyawarah, menekankan kebebasan berpendapat dan beragama. Yang penting dicatat bahwa buku teks terbitan Erlangga

---

<sup>13</sup> Hasniati, "Analisis Muatan Radikalisme dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 2017.

mengandung banyak muatan toleransi dan demokrasi. Sedangkan buku teks terbitan pemerintah mengandung banyak muatan radikalisme. Penelitian ini menguatkan riset Abu Rochmad tahun 2012 yang menyatakan bahwa buku rujukan dan lembar kerja siswa (LKS) PAI SMA mengandung pemahaman yang dapat mendorong siswa untuk membenci agama ataupun bangsa lain. Penelitian ini juga selaras dengan hasil Riset PPIM tahun 2016 yang menyebutkan bahwa buku teks PAI SMA mengandung pesan ambigu dan kontradiktif. Hal tersebut terlihat dari adanya teksteks radikal, intoleran, anti demokrasi di samping teks-teks toleransi dan demokrasi. Selanjutnya, tesis ini membantah pendapat Syarif Abdurrahmanul Hakim tahun 2014 yang menyatakan bahwa tidak terdapat unsur-unsur radikalisme dalam kurikulum PAI.

3. Abdul Halik, “Strategi Kepala Madrasah Dan Guru Dalam Pencegahan Paham Islam Radikal Di Madrasah Aliyah Negeri (Man) Mamuju” .<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh kepala madrasah dan guru ada dua yaitu: 1) strategi akademik yakni strategi yang dilakukan pada saat jam pelajaran di madrasah), 2)strategi non-akademik yakni strategi yang dijalankan di luar jam pelajaran di madrasah. Ragam faktor yang mempengaruhi proses belajar berasal dari faktor pendukung dan penghambat seperti pada faktor pendukung yaitu: Visi dan misi madrasah, minat masyarakat, suasana madrasah yang kondusif, kualifikasi pendidik, sarana dan prasarana. Sementara faktor penghambat yaitu:

---

<sup>14</sup> Abdul Halik, “Strategi Kepala Madrasah Dan Guru Dalam Pencegahan Paham Islam Radikal Di Madrasah Aliyah Negeri (Man) Mamuju” (Tesis, Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar) 2016



minimnya koleksi perpustakaan, Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Implikasi dari penerapan strategi tersebut yaitu terbentuknya pola pemahaman yang moderat di kalangan siswa baik itu secara teologis, sosiologis maupun secara psikologis. Kesemuanya tidak ada menunjukkan adanya kelainan praktis ritus dan pemikiran. Implikasi dari hasil penelitian ini terhadap sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Beberapa upaya strategis telah dijalankan di madrasah ini dan berefek bagi perkembangan mental dan kecerdasan peserta didik. berbagai peluang dan terobosan untuk lebih memberdayakan siswa dalam lingkungan pembelajaran, khususnya dalam menciptakan suasana sekolah kondusif.

### Perbedaan dan Persamaan

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Nala Auna Rabba	Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Mencegah Radikalisme Di Sma Khadijah Surabaya	• Peran Guru Pendidikan Agama Islam	• Mencegah Radikalisme
2	Hasniati	Analisis Muatan Radikalisme dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA	• Menganalisis Muatan Radikalisme Buku Teks Pendidikan Agama Islam (PAI) SMA	Tentang islam Radikal
3	Abdul Halik	Strategi Kepala Madrasah dan	• Strategi Kepala Madrasah Dan	Tentang islam Radikal di

		Guru dalam Pencegahan Paham Islam Radikal di Madrasah Aliyah Negeri (Man) Mamuju	Guru	Madrasah Aliyah
--	--	----------------------------------------------------------------------------------	------	-----------------

Dengan adanya penelitian terdahulu di atas, dimaksudkan untuk memperjelas posisi penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang peneliti lakukan mempunyai titik perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian di atas belum dikaji secara rinci hal-hal yang terkait dengan; (1) kebijakan kepala madrasah dalam mencegah paham islam radikal di MA Miftahul Qulub Polagan, (2) implementasi kebijakan kepala madrasah dalam mencegah paham Islam radikal di MA Miftahul Qulub Polagan, (3) hasil kebijakan kepala madrasah dalam mencegah paham Islam radikal di MA Miftahul Qulub Polagan.

Mengingat hal-hal seperti di atas belum dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini menjadi penting dilakukan, sebab selain fokus dan segmentasi kajian penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, juga pertanyaan di atas penting dijawab untuk mengetahui gambaran utuh mengenai kebijakan kepala madrasah dalam mencegah paham islam radikal di MA Miftahul Qulub Polagan.